



DISFUNGSI GUIDING BLOCK DAN AKSESIBILITAS PENYANDANG TUNA NETRA DI JALAN SUMBERSARI DAN JALAN VETERAN, KOTA MALANG

Agustian Baharudin Surya Maulana¹⁾, Fajar Arya Ajinugraha²⁾, Dzakwan Nizar Irsyad Nabil³⁾, Anindya Salsabila Putri⁴⁾, Nathania Windhy Srimaya Fadihilah⁵⁾, Azhar Khusnun Afifah⁶⁾, Muhammad Rofiul Alim⁷⁾

^{1,2,3,4,5,6)} Departemen Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya

⁷⁾ MAN 2 Tuban, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban

Abstrak

Infrastruktur aksesibilitas merupakan indikator penting dalam mewujudkan kota yang inklusif bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang tuna netra. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi guiding block di Jalan Sumbersari dan Jalan Veteran, Kota Malang, serta mengkaji dampaknya terhadap mobilitas mandiri penyandang tuna netra. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guiding block belum memenuhi standar aksesibilitas karena ditemukan kerusakan fisik, kesalahan pola pemasangan, terputusnya jalur pemandu, serta berbagai hambatan eksternal yang mengurangi fungsinya. Kondisi tersebut menyebabkan guiding block tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana navigasi, sehingga penyandang tuna netra lebih mengandalkan memori spasial dan bantuan orang lain dalam beraktivitas. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan guiding block tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya implementasi kebijakan aksesibilitas di ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan infrastruktur yang disertai pengawasan, pemeliharaan, penegakan aturan, serta melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan evaluasi untuk mewujudkan ruang publik yang lebih inklusif.

Kata Kunci: aksesibilitas disabilitas, guiding block, infrastruktur inklusif.

PENDAHULUAN

Pembangunan kota modern menempatkan konsep inklusivitas sebagai salah satu isu yang banyak dikaji. Kota yang ideal seharusnya mampu memberikan akses yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan usia, kondisi fisik, maupun karakteristik lainnya. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak kota di Indonesia, termasuk kota-kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan perekonomian, masih belum memenuhi prinsip tersebut (Ningrum, 2025).

Kajian mengenai aksesibilitas ruang publik di kawasan perkotaan umumnya masih berfokus pada aspek infrastruktur. Padahal, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan dimensi fisik, tetapi juga mencakup aspek hukum, teknis, sosial, dan budaya. Indonesia telah memiliki landasan hukum yang relatif komprehensif dalam menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai regulasi yang progresif menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengakses fasilitas publik (Silvia et al., 2022).

Keberadaan regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Namun, realitas menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum sesuai dengan harapan. Di berbagai kota besar di Indonesia, *guiding block* memang telah tersedia, tetapi keberadaannya sering kali bersifat simbolis dan belum berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagian *guiding block* mengalami kerusakan akibat usia tanpa adanya perbaikan, sedangkan sebagian lainnya dipasang tanpa memperhatikan kaidah spasial yang tepat sehingga informasi yang diberikan justru membingungkan pengguna. Selain itu, banyak *guiding block* tertutup atau terhalang oleh berbagai elemen lain sehingga

kehilangan fungsi utamanya sebagai jalur pemandu. Kondisi tersebut justru menjadi pengingat terhadap keterbatasan penyandang tuna netra dalam mengakses dan bergerak secara mandiri di ruang publik (Sellina et al., 2024).

Sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur sekaligus dikenal sebagai kota pendidikan dengan jumlah mahasiswa yang tinggi, Kota Malang memiliki karakteristik yang khas. Aktivitas pejalan kaki di kawasan pusat kota berlangsung dengan intensitas yang tinggi karena mobilitas masyarakat terjadi sepanjang waktu. Di antara para pejalan kaki tersebut terdapat penyandang tuna netra yang menjalankan berbagai aktivitas, seperti menuju perguruan tinggi, bekerja, berbelanja, maupun melakukan aktivitas sehari-hari. Jalan Sumbersari dan Jalan Veteran yang menjadi lokasi penelitian merupakan koridor strategis yang menghubungkan berbagai kawasan penting di Kota Malang, terutama pusat Pendidikan dan ekonomi.

Berdasarkan hasil pengamatan awal di lapangan menunjukkan kondisi yang belum memenuhi harapan. *Guiding block* telah terpasang pada berbagai segmen di kedua ruas jalan tersebut, tetapi masih ditemukan berbagai permasalahan. Beberapa segmen mengalami kerusakan fisik, seperti ubin yang retak, terangkat dari permukaan, atau bahkan hilang sehingga menimbulkan celah yang berpotensi membahayakan pengguna. Pada segmen lainnya, pola pemasangan *guiding block* tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pada banyak titik *guiding block* terhalang oleh pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar sebagai lokasi berjualan, kendaraan bermotor yang diparkir secara sembarangan, maupun tiang reklame yang dipasang tanpa mempertimbangkan fungsi jalur pemandu. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa disfungsi *guiding block* di Kota Malang tidak hanya mencerminkan tidak berfungsinya secara optimal pada teknis, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan yang bersifat sistemik dalam pengelolaan ruang publik dan penyediaan layanan bagi kelompok rentan (Oktaferly, 2023).

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa persoalan aksesibilitas tidak dapat dijelaskan hanya melalui data mengenai jumlah *guiding block* yang berfungsi atau mengalami kerusakan. Permasalahan tersebut memerlukan kajian yang lebih mendalam mengenai konteks, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap kehidupan penyandang tuna netra. Ketika *guiding block* tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dampaknya tidak hanya berupa berkurangnya kenyamanan saat berjalan, tetapi juga mengurangi kemandirian, meningkatkan ketergantungan terhadap bantuan orang lain, serta membatasi kesempatan penyandang tuna netra untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan secara sistematis dan analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan aksesibilitas di ruang publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data empiris mengenai fungsi *guiding block*, persepsi penyandang tuna netra, serta faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatannya.

Lokasi penelitian ditetapkan di Jalan Sumbersari dan Jalan Veteran, Kota Malang, berdasarkan beberapa pertimbangan strategis yakni, merupakan koridor utama dengan intensitas lalu lintas pejalan kaki yang

tinggi serta menghubungkan berbagai kawasan penting, terutama kawasan pendidikan. Selain itu, kedua lokasi tersebut diketahui menjadi jalur mobilitas yang sering digunakan oleh penyandang tuna netra dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik untuk meningkatkan kelengkapan dan keabsahan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya dianalisis secara sistematis. Dokumentasi menjadi bukti visual dan kontekstual untuk memperkuat serta mendukung penyajian kondisi lapangan (Purba et al., 2025).

Tahap analisis reduksi data, deskriptif, dan penarikan simpulan berdasarkan hasil analisis. Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, diterapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan serta mengonfirmasi temuan yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Aktual *Guiding Block*

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kondisi *guiding block* di Jalan Sumbersari dan Jalan Veteran memiliki permasalahan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Disfungsi yang ditemukan tidak hanya terjadi pada satu dimensi, tetapi mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan. Dengan demikian, perbaikan terhadap satu permasalahan saja belum mampu mengembalikan fungsi *guiding block* secara optimal karena masih terdapat faktor lain yang turut menghambat efektivitasnya.

Dimensi pertama yang ditemukan adalah kerusakan fisik *guiding block*. Hasil observasi menunjukkan bahwa sejumlah ubin *guiding block* pada kedua ruas jalan berada dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut meliputi ubin yang retak, pecah,

terangkat dari permukaan, hingga hilang pada beberapa segmen jalur. Ubin yang retak dan pecah berpotensi mengurangi kenyamanan serta keamanan pengguna, sedangkan ubin yang terangkat dapat menyebabkan tongkat pemandu tersangkut atau meningkatkan risiko terjatuh. Selain itu, hilangnya ubin pada beberapa titik menyebabkan terputusnya jalur pemandu sehingga mengganggu proses navigasi penyandang tuna netra. Bagi penyandang tuna netra yang mengandalkan tongkat pemandu sebagai alat navigasi, kerusakan sekecil apa pun pada jalur *guiding block* dapat mengurangi efektivitas orientasi dan mobilitas di ruang publik (Prahastuti et al., 2024).

Dimensi kedua berkaitan dengan kesalahan pemasangan dan pola teknis *guiding block*. Temuan ini menunjukkan bahwa proses instalasi belum sepenuhnya mengacu pada prinsip fungsi dan standar teknis *guiding block*. Pada beberapa titik ditemukan ubin berpola titik (*dot block*), yang seharusnya berfungsi sebagai penanda kewaspadaan, dipasang bersamaan dengan ubin berpola garis (*strip block*) yang berfungsi sebagai penunjuk arah. Berdasarkan standar pemasangan, *dot block* digunakan pada titik-titik tertentu, seperti persimpangan, perubahan arah, atau area yang memerlukan kewaspadaan lebih tinggi, sedangkan *strip block* dipasang secara kontinu sebagai penunjuk arah perjalanan. Pemasangan kedua pola tersebut pada lokasi yang sama tanpa memperhatikan logika spasial menyebabkan informasi yang diterima pengguna menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan kebingungan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pemasangan *guiding block* belum didasarkan pada pemahaman yang memadai mengenai fungsi setiap elemen maupun kebutuhan pengguna sebagai penerima manfaat utama.

Dimensi ketiga adalah adanya hambatan eksternal yang mengurangi bahkan menghilangkan fungsi *guiding block*. Hasil observasi menunjukkan bahwa sejumlah *guiding block* yang secara fisik masih berada dalam kondisi baik tidak dapat dimanfaatkan karena terhalang oleh berbagai elemen di atas trotoar. Hambatan tersebut antara lain berupa lapak pedagang kaki lima, kendaraan bermotor yang diparkir di atas jalur pemandu, serta tiang reklame, tiang listrik, dan elemen infrastruktur lainnya yang dipasang tanpa mempertimbangkan keberadaan jalur aksesibilitas. Pada beberapa lokasi bahkan ditemukan kombinasi beberapa hambatan sekaligus sehingga *guiding block* tidak dapat digunakan sama sekali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan *guiding block* tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengelolaan ruang publik dan penegakan peraturan. Selain itu, kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi *guiding block* sebagai fasilitas penting yang mendukung mobilitas penyandang tuna netra.

Analisis terpadu terhadap tiga dimensi disfungsi, terlihat bahwa *guiding block* di Jalan Sumbersari dan Jalan Veteran belum mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai infrastruktur aksesibilitas. Berdasarkan standar teknis yang berlaku, *guiding block* harus memenuhi tiga persyaratan utama, yaitu memiliki jalur yang berkesinambungan, bebas dari berbagai hambatan, dan memiliki kontras visual yang memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga persyaratan tersebut belum terpenuhi secara konsisten pada sebagian besar segmen yang diamati. Kondisi ini menggambarkan adanya fenomena aksesibilitas simbolis, yaitu keberadaan fasilitas aksesibilitas secara fisik yang memberikan kesan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas telah

dipenuhi, tetapi belum mampu memberikan manfaat sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Dari perspektif penyelenggara, keberadaan *guiding block* sudah terpenuhi sesuai regulasi. Namun, dari sudut pandang penyandang tuna netra sebagai pengguna utama, fasilitas tersebut belum aman, nyaman, dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemenuhan regulasi secara administratif dengan implementasi aksesibilitas yang efektif di lapangan (Saptaningtyas et al., 2024).

Dampak terhadap Mobilitas Mandiri

Untuk memahami dampak disfungsi *guiding block* secara komprehensif, terlebih dahulu perlu dipahami fungsi *guiding block* bagi penyandang tuna netra. *Guiding block* bukan sekadar fasilitas pelengkap yang bertujuan meningkatkan kenyamanan pengguna, melainkan merupakan infrastruktur navigasi yang mendukung mobilitas mandiri penyandang tuna netra di ruang publik. Kemampuan untuk bergerak secara mandiri memiliki arti yang sangat penting karena berkaitan dengan kualitas hidup, kemandirian, serta martabat individu.

Hasil wawancara dengan penyandang tuna netra yang secara rutin menggunakan Jalan Sumbersari dan Jalan Veteran menunjukkan pengalaman yang relatif serupa. Sebagian besar informan menyatakan bahwa *guiding block* yang tersedia belum dapat dimanfaatkan sebagai sarana navigasi yang mendukung mobilitas mereka. Beberapa informan bahkan mengaku telah berhenti menggunakan *guiding block* setelah mengalami pengalaman negatif, seperti tersandung atau kehilangan arah akibat kondisi jalur yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai bentuk adaptasi, mereka mengandalkan memori spasial yang

diperoleh melalui pengalaman berulang dalam melintasi jalur tersebut. Informan menghafalkan berbagai titik acuan, seperti jumlah langkah menuju persimpangan, penanda suara, maupun area parkir kendaraan yang harus dihindari. Strategi tersebut menunjukkan kemampuan adaptasi penyandang tuna netra, tetapi pada saat yang sama mencerminkan ketidakmampuan infrastruktur publik dalam menjalankan fungsi yang seharusnya mendukung mobilitas mereka.

Strategi adaptasi yang bergantung pada memori spasial memiliki keterbatasan ketika terjadi perubahan kondisi lingkungan. Perubahan seperti renovasi bangunan, perbaikan jalan, perpindahan lokasi pedagang kaki lima, perubahan tata letak trotoar, maupun posisi kendaraan yang berbeda dari biasanya dapat menghilangkan titik acuan yang selama ini digunakan. Akibatnya, penyandang tuna netra mengalami kesulitan dalam menentukan orientasi perjalanan. Dalam kondisi tersebut, mereka terpaksa meminta bantuan kepada orang lain, baik dengan bertanya kepada pejalan kaki, meminta pendampingan selama perjalanan, maupun menghindari lokasi tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakberfungsian infrastruktur aksesibilitas mengurangi kemandirian pada penyandang tuna netra.

Dampak disfungsi *guiding block* tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap dimensi sosial dan psikologis. Ketergantungan yang terus-menerus kepada orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari dapat memengaruhi rasa percaya diri, kemandirian, serta cara individu berinteraksi dengan masyarakat. Kemampuan untuk bergerak secara mandiri merupakan bagian penting dari pemenuhan hak dan martabat setiap individu. Ketika

kemampuan tersebut terhambat, penyandang tuna netra berpotensi mengalami perasaan tidak berdaya dan semakin bergantung pada bantuan orang lain. Kondisi ini juga membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan publik, seperti bekerja, berbelanja, maupun melakukan aktivitas sosial secara mandiri. Dengan demikian, infrastruktur aksesibilitas yang tidak berfungsi secara optimal secara tidak langsung mengurangi kesempatan penyandang tuna netra untuk menikmati ruang publik sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa disfungsi *guiding block* di Jalan Sumbersari dan Jalan Veteran menyebabkan ruang publik belum mampu memberikan akses yang efektif dan efisien bagi penyandang tuna netra. Kondisi ini mencerminkan adanya bentuk eksklusi dalam penyediaan ruang publik, yaitu ketika lingkungan perkotaan secara struktural lebih mudah diakses oleh kelompok tertentu dibandingkan kelompok lainnya. Ketidakberfungsian infrastruktur aksesibilitas memberikan kesan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas belum menjadi prioritas dalam proses perencanaan kota. Akibatnya, ruang publik yang secara normatif ditujukan untuk seluruh masyarakat pada praktiknya belum dapat dimanfaatkan secara setara oleh penyandang disabilitas. Bentuk eksklusi tersebut bersifat tidak langsung, tetapi memberikan dampak nyata terhadap kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas (Cipto et al., 2011).

Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai aspek dalam proses perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan penegakan kebijakan yang masih memerlukan perbaikan. Disfungsi *guiding block* dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat sistemik. Pertama, belum tersedianya mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang efektif

terhadap kerusakan infrastruktur aksesibilitas sehingga perbaikan sering kali tidak dilakukan secara cepat. Kedua, pelaksanaan audit aksesibilitas secara berkala masih terbatas sehingga berbagai kerusakan maupun ketidaksesuaian fungsi tidak segera teridentifikasi. Ketiga, keterlibatan penyandang tuna netra dalam proses perencanaan, perancangan, dan evaluasi infrastruktur aksesibilitas masih belum optimal. Akibatnya, pembangunan fasilitas lebih banyak didasarkan pada asumsi perencana daripada kebutuhan nyata pengguna. Keempat, penegakan aturan terhadap pemanfaatan ruang trotoar masih lemah sehingga penyalahgunaan *guiding block* oleh pedagang kaki lima, kendaraan yang diparkir sembarangan, maupun pemasangan berbagai elemen infrastruktur lainnya masih sering ditemukan. Oleh karena itu, disfungsi *guiding block* bukan merupakan peristiwa yang bersifat insidental, melainkan konsekuensi dari sistem pengelolaan ruang publik yang belum sepenuhnya menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek utama dan penerima manfaat dalam perencanaan kota yang inklusif dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *guiding block* di Jalan Sumbersari dan Jalan Veteran, Kota Malang, belum memenuhi standar teknis aksesibilitas akibat kerusakan fisik, kesalahan pemasangan, terputusnya jalur, serta adanya hambatan eksternal. Kondisi tersebut menyebabkan *guiding block* belum mampu berfungsi secara optimal sebagai sarana navigasi bagi penyandang tuna netra. Akibatnya, mobilitas dan kemandirian penyandang tuna netra menjadi terbatas, sehingga partisipasi mereka dalam ruang publik belum dapat terwujud secara setara. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan infrastruktur yang

didukung oleh pengawasan, pemeliharaan, penegakan aturan, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan evaluasi agar aksesibilitas ruang publik dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Cipto, J., Kota, M., & Berdasarkan, C. (2011). Jurnal Manajemen Aset dan Penilaian. 5(2), 94–107.

Ningrum, A. P. (2025). Konsep Pembangunan Kota Inklusif Melalui Penataan Pedestrian di Kawasan Kota Lama Semarang.

Oktaferly, F. J. (2023). Peran Infrastruktur Pendukung Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra. 4(2).

Prahastuti, A. C., Studi, P., Fakultas, A., Surakarta, U. M., Setyowati, S., Studi, P., Fakultas, A., Surakarta, U. M., & Teknis, P. (2024). EVALUASI AKSESIBILITAS JALUR PEDESTRIAN DAN JALUR PEMANDU BAGI TUNANETRA DI ALUN-ALUN TEMANGGUNG. 932–941.

Purba, A. A., Natasya, N., Irham, M., Jurusan, M., Islam, E., Estate, M., & Deli, K. (2025). Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah Menggunakan Metode Kualitatif Deskripsi.

Saptaningtyas, R. S., Hani, L., & Wardi, S. (2024). ANALISIS KETIDAKTERSEDIAAN GUIDING BLOCK SERTA. 2(1), 81–86.

Sellina, R., Mulia, D., Sidik, S. A., & Asmiati, N. (2024). block bagi tunanetra Study of society understanding towards guiding block accessibility for blind people. 9(1), 1–8.

Silvia, F., Hadiyanto, P., & Rachim, A. (2022). DISABILITAS DI INDONESIA. 4(2), 225–232.